

WILAYAH DAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH KOTA

Ardiyan Adhi Wibowo*¹
¹Program Studi Arsitektur UNSIQ

Info artikel : diterima tanggal : 09 November 2011, diterbitkan tanggal 03 Desember 2010

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, memiliki masalah perkotaan yang sangat kompleks. Sebagai salah satu ciri negara berkembang adalah sangat pesatnya perkembangan penduduk perkotaan terutama kota-kota besar dari negara tersebut, sebagai akibat dari tingginya angka pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Sementara pemerintah kota belum siap dengan antisipasi suprastruktur (peraturan ruang kota yang pasti) dan kelengkapan infrastruktur ruang kota (fasilitas jalan, air bersih, riol, fasilitas sosial, dan fasilitas umum) untuk wilayah tersebut. Sehingga masih banyak kelompok sosial dengan permukiman kumuh pada sejumlah daerah perkotaan. Ada beberapa faktor sosial-budaya penyebab tetap terjadinya kesemrawutan arsitektur dan buruknya kualitas bangunan rumah serta lingkungan pada permukiman terpinggirkan, salah satunya karena tidak adanya kepedulian masyarakat sekitar terhadap kondisi rumah atau lahan yang mereka tempati sebagai akibat dari tidak adanya rasa memiliki, karena kebanyakan rumah yang ditempati adalah rumah kontrakan milik penduduk asli setempat. Oleh karena itu sangat penting adanya penataan wilayah dan lokasi permukiman kumuh kota.

Kata Kunci : Penataan wilayah kumuh kota

Abstract

Indonesia as a developing country has very complex urban problems. One of the characteristics of a developing country is the very rapid development of the urban population, especially the country's large cities, as a result of high levels of population growth and urbanization. Meanwhile, the DKI Provincial Government is not ready to anticipate the superstructure (definite city spatial planning regulations) and the completeness of urban spatial infrastructure (roads, clean water, sewers, social facilities, and public facilities) for the area. So that there are still many social groups with slum settlements in a number of urban areas. There are several socio-cultural factors that cause architectural chaos and the poor quality of houses and environments in marginalized settlements, one of which is the lack of concern of the surrounding community with the condition of the house or land they occupy as a result of a lack of sense of belonging, because most of them are rented houses belong to local natives. Therefore, it is very important to arrange the area and location of urban slum settlements.

Key words: Urban slum area arrangement

PENDAHULUAN

Kondisi sosial ekonomi penduduk yang rendah, kesulitan mendapatkan perumahan atau lahan yang layak untuk tempat tinggal di kota-kota besar telah mendorong orang untuk tinggal di daerah permukiman yang kumuh. Makin besar jumlah penduduk, makin rendah tingkat sosial ekonomi penduduk, dan makin sulit mendapatkan lahan atau rumah layak untuk dihuni, semakin besar tekanan penduduk untuk tinggal di daerah lingkungan yang minim ini. Pada mulanya mereka menimbulkan pencemaran kecil pada lingkungan, lama kelamaan lingkungan semakin padat dan pada akhirnya menjadi daerah pemukiman kumuh.



Gambar 1 : Lingkungan permukiman kumuh kota
Sumber : Dokumen pribadi

Arsitektur dan permukiman adalah dua hal yang selalu berkaitan atau tak terpisahkan. Setiap berbicara permukiman sesederhana apapun selalu melibatkan masalah arsitektur. Arsitektur dapat menjadi cermin dari keberadaan suatu permukiman dari kelompok sosial tertentu. Dengan demikian, arsitektur suatu wilayah permukiman dapat menunjukkan baik buruknya keadaan sosial,

ekonomi dan budaya dari warga/masyarakat yang bermukim di situ.

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, memiliki masalah perkotaan yang sangat kompleks. Sebagai salah satu ciri negara berkembang adalah sangat pesatnya perkembangan penduduk perkotaan terutama kota-kota besar dari negara tersebut, sebagai akibat dari tingginya angka pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Kaum urban dari kalangan miskin, biasanya menyasar pinggiran kota yang belum memiliki fasilitas ruang kota, agar lebih murah. Salah satu akibatnya adalah munculnya permukiman kelompok sosial kota terpinggirkan, yang tidak terencana, tidak memiliki fasilitas infrastruktur, yang semakin lama semakin berkembang secara alami dan akhirnya tumbuh tidak terkendali menjadi wilayah permukiman yang serba semrawut dan kumuh.

Sementara itu pemerintah kota belum siap dengan antisipasi suprastruktur (peraturan ruang kota yang pasti) dan kelengkapan infrastruktur ruang kota (fasilitas jalan, air bersih, riol, fesos, fasum) untuk wilayah tersebut. Salah satu ciri arsitektur permukiman dari kelompok sosial terpinggirkan adalah rumah dibangun tidak permanen, sangat sederhana dan sempit serta berdempetan sebagai akibat dari padatnya penduduk kampung. Sanitasi lingkungannya sangat buruk bahkan ada yang dapat disebut sebagai rumah tidak layak huni. Misalnya, ada rumah yang luasnya hanya beberapa meter persegi saja, tinggi satu meter, terbuat dari plastik atau kardus dan menempel pada tembok orang lain.

Apabila kemudian kita berpaling kepada pendapat Eko Budihardjo (1983: 5) bahwa arsitektur adalah pengejawantahan yang jujur dari tata cara kehidupan masyarakat, maka ciri-ciri arsitektur masyarakat kampung kota seperti tersebut di atas, adalah salah satu cermin kemiskinan sudut kota. Penduduk miskin kota ini sudah biasa hidup dalam sistem sosial, ekonomi dan budayanya sendiri yang disebut budaya kemiskinan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya, yaitu: Apa yang menjadi penyebab kesemrawutan permukiman yang kumuh, Bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh kesemrawutan permukiman kumuh, Bagaimana solusi penataan arsitektur permukiman kumuh, Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program penataan.

Tinjauan Pustaka

Studi-studi tentang kota di Dunia Ketiga menunjukkan adanya interkoneksi sistem yang erat antara orang kaya di kota dan orang miskin kota, adanya ketergantungan ekonomi kolonial dari kelas menengah yang naik bintangnya di antara puluhan ribu orang miskin. Kelompok sosial miskin kota hidup dari berburu dan meramu di hutan belukar kota, yang setiap hari pergi berburu pekerjaan. Kehidupan

mereka didasarkan atas sisa-sisa: sisa pekerjaan, sisaperdagangan, sisa ruang hidup, rumah terbuat dari sisa-sisa. Mereka mendiami celah-celah sistem industri kota dan makan dari buangnya.

Akan tetapi, meskipun sifatnya marginal/terpinggirkan, pasukan compangcamping kaum miskin perkotaan itu menjalankan fungsi sosial yang penting meskipun masih belum diakui, khususnya bagi lahirnya kelas menengah di kota, yang sangat berhutang budi kepada adanya tenaga dan jasa murah. Kaum miskin bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun, pesuruh, sopir, dan sejumlah besar tenaga kasar berbagai bentuk. Kalau ada hubungan simbiosis antara masyarakat kota dan marginalitas, yang menarik keuntungan besar sudah pasti ialah kelas menengah (Lomnitz, 1977).

Kelompok Sosial dan Permukiman Kumuh

Kelompok sosial adalah kumpulan dari sejumlah orang (berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu) yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi (Horton & Hunt, 1993). Kelompok sosial terpinggirkan atau lebih tepatnya kelompok sosial marginal yaitu kelompok sosial yang menjadi bagian dari dua budaya atau dua masyarakat, tetapi tidak termasuk secara penuh (utuh) pada salah satu budaya atau masyarakat tersebut (bandingkan, Horton & Hunt, 1993). Mungkin definisi ini lebih mengena dari sudut sosial-budaya, untuk menggolongkan masyarakat urban di permukiman kumuh di kota-kota besar. Karena mereka tidak menjadi bagian penuh dari masyarakat kota tujuan, maka mereka luput dari perencanaan dan sentuhan pembangunan fasilitas kota.



Gambar 2 : Lingkungan permukiman kumuh pinggiran kota

Sumber : Dokumen pribadi

Tidak tersentuhnya kelompok sosial terpinggirkan dari program pembangunan fasilitas kota, juga disebabkan oleh karena mereka tinggal di wilayah kota yang terpinggirkan, yang tidak mesti harus terletak di pinggiran kota, tetapi bisa jadi dekat dengan pusat kota. Hal ini didasarkan pada teori struktur kota yaitu Trade of Model direlasikan dengan Bid-rent Theory. Menurut teori analisis sewa yang ditawarkan (bid-rent analysis), meskipun pola-pola tata guna lahan di perkotaan itu merupakan hasil dari aneka faktor alami dan manusiawi, dapat dikatakan pada dasarnya semua itu merupakan produk belaka dari motivasi ekonomis. Terhadap semua situs di dalam kota terdapat persaingan. Berhasilnya orang menempati suatu situs di kota, pada akhirnya

hanyalah karena tanah tersebut dapat diperas manfaatnya sebanyak-banyaknya, dan mempunyai orang yang bersangkutan membayar harga sewanya. Persaingan tersebut paling kuat terjadi di bagian pusat kota, karena di kawasan itu tersaji lokasi-lokasi yang paling menguntungkan, di samping tanah di situ memang langka. Karena alasan itu pula, maka harga tanah di kawasan pusat kota itu amat mahal (Daldjoeni, 2003). Trade off model, bertalian erat dengan kondisikondisi perilaku yang diidealkan dari segi kemampuan ekonomi.

Sehubungan itu, diasumsikan adanya kota dengan pusat tunggal yang terletak di dataran tanpa topografi yang menonjol, sedang segala kegiatan penduduknya bertumpuk di pusat kota. Di dalam kota, biaya transportasi meningkat langsung mengikuti jarak yang ditempuh dari pusat kota, namun sewa yang tergantung dari keterjangkauan (accessibility) saja, berbanding terbalik dengan jarak. Artinya semakin menjauhi pusat kota, semakin menurunkan sewa. Para pemakai tanah di dalam kota menggunakan keputusan menurut tempatnya masing-masing dengan memperhitungkan kekuatan kantong mereka. Jika hal ini dihubungkan dengan kegiatan perdagangan eceran atau pertokoan, keterjangkauan tempat kegiatan mereka oleh penduduk amatlah penting, sehingga derajat menurunnya economic rent yang ingin mereka pakai untuk berbelanja, amat curam. Karena itulah maka, golongan ekonomi lemah demi penghematan biaya transportasi mencari tempat tinggal mendekati pusat kota yang kebetulan juga merupakan zone perumahan yang sewanya murah.

Dengan demikian, demi murahnya hidup, mereka bertumpuk-tumpuk di kawasan yang berpenduduk padat sekali. Karena dengan cara demikianlah, maka bid-rent gradient mereka lerengnya sedang, tak begitu curam (Daldjoeni, 2003). Dengan demikian maka, dari segi ekonomi kelompok sosial marjinal/terpinggirkan adalah masyarakat berpenghasilan rendah, yang memilih tinggal di bagian wilayah kota terpinggirkan pula dari pertimbangan nilai ekonomis. Dengan demikian, pengertian permukiman kelompok sosial terpinggirkan yang dimaksud di sini, adalah permukiman dari kelompok sosial miskin kota yang merupakan zone perumahan yang sewanya murah, karena kondisi tanah yang paling tidak menguntungkan dari motivasi ekonomi, misalnya di pinggiran bantaran sungai Tukad Badung; atau secara geografis, wilayah-wilayah kota yang sering tergenang banjir di musim hujan dan yang tidak ditunjang fasilitas kota.

Sosial Ekonomi dan Kemiskinan

Berita tentang kemiskinan yang melanda negeri ini tidak pernah luput dari sorotan berbagai media massa di tanah air atau dari luar negeri. Penanganan program pengentasan kemiskinan di Indonesia dari waktu ke waktu, dari rezim satu ke rezim terakhir tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah tuntas. Hal ini menurut Soedjatmoko (1986) membuktikan

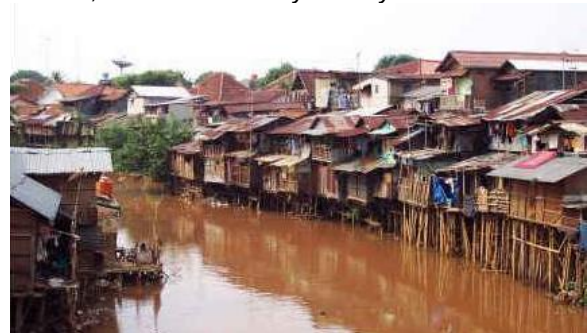
bahwa, ternyata tingkat pengetahuan masyarakat dewasa ini mengenai keanekaragaman wajah kemiskinan di tanah air masih sangat terbatas. Masyarakat tidak tahu struktur-struktur sosial dan kebudayaan kemiskinan di negeri ini. Masyarakat tidak tahu dengan pasti siapa golongan yang paling miskin, di mana mereka berada dan sebab-musabab dari kemiskinan yang sangat mendalam itu.

Masyarakat pun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara mencapainya dan masyarakat tidak akan dapat mengetahuinya selama pengetahuan tentang masalah kemiskinan tidak dikembangkan secara sistematis. Di dalam keadaan seperti sekarang ini, menurut Soedjatmoko susunan masyarakat serta sistem politik yang akan dapat bertahan, hanyalah suatu susunan masyarakat serta sistem politik yang sanggup mengatasi permasalahan kemelaratan negeri ini. Dalam ilmu sosial dibedakan antara kemiskinan mutlak dan relatif. Kemiskinan mutlak tidak memungkinkan seseorang menyelenggarakan hidup manusiawi. Kemiskinan mutlak berarti kemelaratan fisik dan material yang nyata sekali.

Bentuk yang keras adalah kematian dini, entah karena kelaparan, entah karena penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok (basic needs) dan minimum (bagi kelangsungan hidup) adalah konsep di belakang kemiskinan mutlak. Pemenuhan kebutuhan pokok dan minimum menurut International Labour Organizations (ILO, 1976) meliputi kebutuhan minimum sebuah keluarga akan pangan, papan, dan sandang.

Arsitektur Permukiman Kelompok Sosial Terpinggirkan

Di dalam upaya pembangunan untuk meningkatkan derajat kehidupan yang lebih baik bagi kelompok sosial masyarakat di permukiman terpinggirkan ini, pihak perencana dan pelaksana pembangunan tidak hanya dituntut untuk mengetahui masalah-masalah atau kendalakendala yang bersifat fisik saja, tetapi juga yang terkait dengan situasi sosial dan budaya masyarakat sasaran program. Terlebih-lebih terkait dengan lingkungan buatan yang disebut arsitektur, yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan/keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tersebut.



Gambar 3 : Lingkungan permukiman kumuh pinggiran sungai

Sumber : dokumen pribadi

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mangunwijaya (1981) serta Budihardjo (1983) bahwa, masalah arsitektur meliputi kurang lebih 80 % masalah sosial kemasyarakatan, dan baru kemudian sisanya yang 20 % menyangkut masalah teknis teknologis. Kesemrawutan tata ruang dan lingkungan kita disebabkan karena arsitektur terlalu banyak bicara tentang “engineering” daripada masalah sosial.

Semua jenis usaha yang dilakukan warga kampung miskin kota tidak lain adalah bentuk-bentuk strategi untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang paling dasar. Keterbatasan modal, keterbatasan lahan dan atas berbagai pertimbangan lain, maka usaha atau industri dan pembuangan limbah mereka lakukan di lingkup rumah atau pekarangan mereka masing-masing. Bentuk arsitektur perumahan yang dibangun akan disesuaikan dengan guna yang semaksimal mungkin mendukung usaha tersebut, yang berarti otomatis arsitekturnya akan mencitrakan bentuk usaha dan keberadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat miskin yang hidup di dalamnya. Gambaran umum wajah kampung kumuh di permukiman terpinggirkan di kota-kota besar adalah wajah arsitektur rumah seadanya saja, tata ruang bangunan semrawut dengan penampilan jorok, populasi bangunan padat dengan hunian yang tinggi, penggunaan bahan bangunan bekas dan murahan dengan sistem konstruksi yang jauh di bawah standar baku keselamatan untuk penghuninya, lingkungan sekitar selalu kotor, becek, sanitasi buruk, sumur sebagai sumber air bersih tercemar.

Penelitian di sebuah wilayah permukiman terpinggirkan oleh Setiawan (2003) menemukan bahwa lingkungan fisik kampung-kampung sepanjang Kali Code Yogyakarta dari segi sosial-budaya memiliki keterkaitan dengan perilaku masyarakat di kampung tersebut secara dialektik, dalam arti saling mempengaruhi. Keterbatasan fisik, terutama dari segi luasan area serta fasilitas umum yang ada (MCK, air bersih, dan lain-lain) menuntut mereka untuk menggunakan fasilitas umum secara bersama-sama. Hal ini menyebabkan intensitas interaksi sosial antar penduduk kampung tinggi, yang secara tidak langsung menyebabkan tingkat solidaritas sosial di antara penduduk kampung tersebut juga menjadi kuat. Sebaliknya, tingginya tingkat hubungan sosial dan kuatnya solidaritas sosial di antara mereka, secara incremental (motivasi semangat berswadaya) mengharuskan mereka membuat susunan lingkungan fisik agar dapat mewadahi berbagai jenis kegiatan dan bentuk perilaku sosial mereka. Dengan kata lain, perilaku dan lingkungan fisik pada kampung tersebut secara dialektik saling mempengaruhi, dan akhirnya mewujudkan suatu pola kehidupan yang spesifik.

Budaya Kemiskinan dan Modal Sosial

Budaya kemiskinan (culture of poverty) merupakan teori yang mula-mula dikemukakan oleh Oscar Lewis, bahwa ada cara hidup yang pada umumnya sama di antara orang-orang miskin di kota-

kota di banyak daerah di dunia (Keesing, 1992). Budaya kemiskinan merupakan suatu cara hidup dan cara pandang, yang lemah dan gampang puas, dan dialami serta dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang miskin. Penyebab utama kemiskinan terletak pada mentalitas, budaya miskin, dan ketiadaan Modal Sosial.

Masyarakat sulit melepaskan diri dari kungkungan mentalitas yang berorientasi pada apa yang dapat dinikmati pada hari ini. Rendahnya aspirasi, lemahnya pengendalian diri untuk merajut masa depan yang lebih baik, tidak menghargai waktu, ketidaksabaran dalam menunda keinginan sesaat, dan yang lebih mengerumuskan sikap fatalistik yang sangat kuat, merupakan determinan penting yang menipiskan Modal Sosial (Hasbullah, 2006). Lebih lanjut Hasbullah menyebutkan bahwa dalam terminologi Modal Sosial, faktor yang demikian dipahami sebagai bertahannya nilai-nilai dan budaya kemiskinan sebagai konsekuensi dari kuatnya kultur dan orientasi inward looking di suatu kelompok masyarakat.

METODE

Artikel ini merupakan kajian yang menekankan pada penyelesaian permasalahan di lapangan dengan menggunakan kajian literatur. Permasalahan yang diangkat didapat dari lapangan kemudian pembahasan dilakukan berdasarkan dari referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kesemrawutan Permukiman Yang Kumuh

Ada beberapa faktor sosial-budaya penyebab tetap terjadinya kesemrawutan arsitektur dan buruknya kualitas bangunan rumah serta lingkungan pada permukiman terpinggirkan yaitu: tidak adanya kepedulian masyarakat sekitar terhadap kondisi rumah atau lahan yang mereka tempati sebagai akibat dari tidak adanya rasa memiliki, karena kebanyakan rumah yang ditempati adalah rumah kontrakan milik penduduk asli setempat. Demikian pula bagi mereka yang hanya menyewa tanah kosong, selalu ada anggapan bahwa mereka akan tinggal untuk sementara saja, sehingga rumah yang dibangun hanya berwujud sekedar saja, apalagi kebanyakan profesi atau mata pencaharian mereka sebagai pedagang kecil dengan penghasilan yang tidak terlalu besar.



Gambar 4 : Kesemrawutan lingkungan kumuh
Sumber : Dokumen pribadi

Biasanya sisa pendapatan dari hasil penyisihan untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak dialokasikan bagi perbaikan fisik rumah yang ditempati, melainkan untuk memperbesar modal usaha dan untuk dikirim ke daerah asalnya. Kurangnya rasa kepemilikan terhadap rumah juga diketahui menjadi penyebab utama terjadinya kesemrawutan. Kaum urban melihat rumah yang mereka tempati hanya sebagai tempat tinggal sementara. Sebagian terbesar dari mereka menyatakan bahwa ia tidak ingin tinggal menetap karena tujuan mereka hanya untuk mencari uang (pekerjaan), sebagai modal untuk buka usaha di kampungnya bila sudah mencukupi. Faktor sosial-budaya seperti inilah menjadi kendala bagi penataan dan perbaikan arsitektur dan kawasan kumuh atau terpinggirkan. Karena penduduk pendatang biasanya tidak memanfaatkan kelebihan pendapatannya untuk berinvestasi rumah tinggal, sebab mereka selalu berpikir akan kembali ke kampung halamannya setelah cukup berhasil ("kaya"). Ini menandakan adanya nilai-nilai budaya yang tidak cocok untuk pembangunan yaitu cepat puas dengan keberhasilan yang dicapai. Tidak ada semangat yang lebih kuat untuk mandiri, semangat berusaha dan semangat terus maju, terbukti selalu ingin kembali ke kampung, selalu merindukan keindahan pengalaman masa lalu, mengangankan selalu berkumpul bersama keluarga ataupun famili di kampung asal seperti masa lalunya.

Lebih mementingkan primordialisme suku dan daerah. Tidak memiliki visi dan semangat untuk membangun dalam kebersamaan di daerah permukiman tempatnya mencari kerja, karena menganggap etnis lokal bukan bagian dari dirinya atau saudaranya. Inilah yang oleh Putnam (2000) dan Abdullah (2006) disebutnya sebagai Modal Sosial yang rendah. Tepat seperti dikatakan Kuntowijoyo (1987) bahwa, tumbuhnya kota telah mengubah lingkungan komunal desa menjadi lingkungan individualis.

Di sini kelangsungan hidup perorangan merupakan tanda tanya besar, sehingga pekerjaan menjadi motif utama orang untuk tinggal. Di kota, lingkungan tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk bermasyarakat, tetapi sebagai tempat bekerja semata-mata. Manusia kota telah kehilangan keinginan untuk hidup bermasyarakat, keinginan untuk bertanggung jawab, dan keinginan untuk saling bergantung (berhubungan sosial). Individualisme di kota-kota besar telah juga menghilangkan kohesi sosial, sekalipun solidaritas baru dalam asosiasi-asosiasi dapat menggantikan kohesi itu.

Seperti halnya keinginan kaum urban di permukiman kumuh di kota-kota besar, selalu ingin kembali ke asalnya setelah berhasil, berarti mereka menganggap kota sebagai tempat urbannya hanya sebagai tempat untuk berkerja semata-mata, bukan untuk membangun kampung halaman baru yang lebih baik dari asalnya, tidak memiliki visi untuk menjadi penduduk tetap, tidak ada upaya untuk mengakulturasi budaya asalnya dengan budaya

setempat, sehingga tidak ada semangat dan kepedulian terhadap solidaritas penduduk asli setempat walau untuk solidaritas seumat, sesuku dan seasalnya tetap tinggi; tidak ada minat membangun kemasyarakatan di komunitas kerjanya tidak ada keinginan bertanggung jawab terhadap keindahan permukiman di tempat kerjanya; tidak ada semangat kohesi sosial di luar etnik dan agamanya. Akibat dari semua itu, kecintaan terhadap kelestarian dan keindahan lingkungannya sangat lemah, kebutuhan dan niat untuk membangun arsitektur rumah tinggal yang baik dan asri di rantau tidak ada. Pemahaman, kesadaran dan semangat akan arti kesehatan dan keindahan lingkungan sebagai sumber kesehatan tubuh dan keindahan jiwa sangat kurang. Ini cermin dari Modal Sosial yang rendah.

Dampak Negatif Permukiman Kumuh

Dampak negatif kesemrawutan arsitektur permukiman kumuh dalam lingkup luas atau kota adalah dapat menjadi penyakit dari keindahan pemandangan kota dan pemborosan sumber daya Negara/kota. Dari segi kesehatan, kesemrawutan arsitektur dan kekumuhan permukiman terpinggirkan di kota dapat menjadi sumber berbagai jenis penyakit epidemi seperti muntaber, kolera, malaria, demam berdarah dan lain-lain.

Kesemrawutan arsitektur juga berpengaruh pada psikis atau kejiwaan seperti perasaan tidak senang tinggal di rumah atau di lingkungan permukimannya, yang dapat mendorong sebagian warga untuk selalu ingin keluar rumah. Yang berarti arsitektur telah gagal memberi rasa nyaman dan aman baik secara fisik dan kejiwaan, tidak mampu mendidik/menata perilaku penghuninya untuk hidup teratur atau berkepribadian. Sempitnya ruang dalam dari rumah tidak memenuhi standar kenyamanan dan privacy. Demikian juga dengan sistem konstruksi rumah yang tidak memenuhi standar mutu keamanan untuk permukiman. Keamanan yang dimaksud adalah dari segi kekuatan dalam menahan beban dan goyangan gempa bumi, aman dari bencana banjir, kebakaran, dan lain-lain.



Gambar 5 : Salah satu dampak permukiman kumuh

Sumber : Dokumen pribadi

Semua itu tercermin dari hasil penelitian Suwitri (2006) bahwa adanya perasaan tidak senang kepada rumah dan lingkungan permukiman dari masyarakat yang bermukim di sana. Timbulnya perasaan tidak menyenangkan dalam menempati rumah, disebabkan oleh berbagai alasan, sebagai berikut: kebanyakan 32 % karena alasan rumah sumpek/pegap, 26 % rumah sempit, 24 % atap bocor dan rumah becek bila musim hujan, 7 % alasan

sudah biasa, 6 % karena penghuni rumah banyak dan 5 % karena tidak ada ruang pribadi (privacy), Ketidaksenangan terhadap lingkungan permukimanannya juga didasari berbagai alasan: 23 % karena prasarana lingkungan kurang memadai, 22 % lingkungan kurang bersih, 22 % jarak antar tetangga terlalu berdekatan, 21 % banjir di musim hujan, 7 % sudah biasa, dan 5 % tidak senang karena di lingkungannya sering terjadi tindakan kriminal.

Suwitri juga mengungkapkan bahwa dalam kehidupan masyarakat di permukiman kumuh sangat sulit mendapat privacy, akibat keterbatasan ruang yang mereka miliki, sehingga mereka merasa sulit menempatkan sesuatu agar bebas dari gangguan yang tidak dikehendaki, termasuk sulit mendapatkan ruang untuk menyendiri bila saat dibutuhkan. Karena tidak adanya kenyamanan tinggal di rumah menyebabkan mereka cenderung pergi ke luar rumah. Mereka juga sulit membangun personal space (batas tak tampak yang orang lain merasa enggan atau merasa tidak etis memasukinya).

Mereka juga merasa tidak memiliki territoriality atau batas teritorial antar penghuni satu dengan yang lain karena kebanyakan mereka yang bermukim di permukiman kumuh adalah dengan menyewa rumah atau kamar. Batas antar kamar hanya dipisahkan oleh dinding batako, gedeg atau papan, maka sulit bagi mereka menghindari dari gangguan, misalnya akibat konflik keluarga di tetangga sebelah. Penemuan lain yang menarik adalah dari segi keamanan lingkungan, masih cukup rawan. Penelitiannya dari sudut kriminalitas di lingkungan kumuh masih cukup tinggi, ada 24 % responden menyatakan lingkungannya pernah mengalami gangguan tindakan kriminal, umumnya berupa pencurian. Sedangkan berkaitan dengan tindakan amoral di lingkungannya ada 46 % berupa mabukmabukan (mabuk sendiri adalah salah bentuk pelarian dari masalah, pen.). Yang menarik, di beberapa permukiman kumuh di yang ada, ditemukan beberapa responden menyatakan ada prostitusi di lingkungannya. Salah satu narasumber yang diperoleh Suwitri juga memberi keterangan bahwa, kriminal kerap terjadi di lingkungannya, umumnya pelaku kriminal tinggal di lingkungan seperti ini, tetapi pelaku juga melakukan kejahatan di tempat/lingkungan lain. Ini membuktikan bahwa berbagai stereotip yang muncul tentang perkampungan kumuh atau miskin kota, sebagai sumber kejahatan, patologi kebudayaan dan disorganisasi sosial bisa jadi benar, terlebih-lebih apabila memang benar masyarakat urban kurang/lemah dalam melakukan kohesi sosial dan membangun solidaritas sosial bersama masyarakat asli setempat, yang salah satu dampaknya ialah rawannya keamanan lingkungan.

Sebaliknya, bila kohesi sosial mereka kuat hanya di antara sesama suku, agama, dan asal maka dampak yang timbul justru lebih parah, yaitu timbulnya benih ketidakpercayaan, kecemburuan sosial antar etnik, agama, sebagai akibat dari

nasionalisme sempit/kedaerahan. Terlihat dari hasil penelitian Dedi Prasetyo, dkk. (2003) dalam tinjauan aspek sosial budayanya menemukan bahwa kegiatan tolong menolong sesama tetangga permukiman kumuh ditandai dengan saling kunjung mengunjungi dan membantu warga lain yang mempunyai hayatan ataupun kesusahan sebagai manifestasi kuatnya hubungan sosial di antara mereka.

Solusi Penataan Arsitektur Lingkungan Kumuh

Pemecahan masalah terhadap adanya permukiman kumuh bukanlah hal yang mudah sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh siapa pun dan dinas mana pun yang dilibatkan oleh pemerintah kota dalam perencanaan dan penataan permukiman baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Budihardjo (1998), adalah:

1. Masalah kepribadian atau personality. Masyarakat berpenghasilan rendah sebagai orang yang biasa tinggal di dalam rumahrumah yang sempit di kota mempunyai outdoor personality, yaitu tidak suka diam di dalam rumah, melainkan lebih suka beraktivitas di luar rumah. Misalnya mengobrol dengan tetangga di jalanan, mandi dan mencuci ke sungai, mengobrol dengan orang lain di pasar dan sebagainya.

2. Masalah "Sense of belongingness". Merupakan permasalahan dalam rasa kepemilikan di mana masyarakat berpenghasilan rendah ini biasanya mau memelihara fasilitas-fasilitas pribadi dengan sebaik-baiknya.

3. Masalah merubah kebiasaan sehari-hari. Berkaitan dengan kehidupan keseharian yang sering kali/berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi kebiasaan, maka perlu dipilih mana yang bisa dipertahankan dan yang tidak, untuk memudahkan cara hidup mereka di lingkungan yang baru ataupun meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Dalam penataan arsitektur permukiman kumuh bagi masyarakat yang modal sosial rendah, tidak mungkin mengharap datangnya inisiatif dari pihak mereka sendiri. Karena itu, dibutuhkan peran pihak ketiga dalam hal ini dinas pemerintah terkait, dengan melibatkan lembagalembaga swadaya masyarakat yang memahami kompleksitas masalah permukiman kumuh, bukan saja dari segi teknis-teknologis tetapi terutama dari segi sosial-budayanya. Sebaliknya, perencanaan penataan arsitektur di permukiman kumuh kota, tidak bisa hanya dari satu arah oleh pihak/penguasa saja, tetapi harus bersifat timbal balik, dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat di permukiman kumuh sebagai subjek utama. Minimal penguasa memperhatikan aspirasi dan masukan dari mereka, karena mereka yang akan hidup di sana dan mereka lebih tahu kebutuhan mereka sendiri tentang fungsi guna ruang, serta lebih faham kondisi lingkungannya.



Gambar 6 : Penataan Kota dan Permukiman
Sumber : Dokumen pribadi

Penentu kebijaksanaan hanya wajib memberi pengarah teknik penataan ke arah yang lebih baik dan manusiawi, membantu pengerjaan menuju standar baku mutu keamanan, kenyamanan, dan keindahan arsitektur permukiman kota yang beradab. Masyarakat miskin yang menjadi sasaran projek harus diberi kebebasan dalam mengatur dan membentuk kawasan permukiman mereka sendiri. Peran aktif penduduk miskin bukan lagi dianggap sekedar unsur pelengkap perbaikan permukiman kumuh kota, tetapi sudah menjadi suatu unsur fundamental atau mutlak, sebab hanya dengan begitulah mereka dapat menemukan jati dirinya masing-masing dalam berarsitektur, sehingga dapat lebih membangkitkan modal sosial mereka untuk pembangunan kota tujuan.

Tidak diharapkan pola penataan yang militeristik dengan penyeragaman bentuk arsitektur, karena masing-masing masyarakat miskin pun memiliki keunikan perilaku dan keanekaragaman kondisi sosial, ekonomi, budaya sebagai jati dirinya masing-masing. Biarkan mereka menunjukkan jati dirinya di dalam perencanaan dan penataan arsitektur/lingkungan pribadi mereka, karena pada hakekatnya jati diri itulah menjadi nafas dan jiwa, pemberi karakter spesifik suatu bangunan atau lingkungan binaan manusia. Hanya dibutuhkan sedikit adaptasi pada wajah depan arsitektur, disesuaikan dengan visi dan misi Perda tentang Arsitektur Daerah masing-masing kota. Oleh karena itu untuk bisa menggali keinginan, harapan dan dambaan yang sebenarnya dari penduduk miskin kota, para pimpinan daerah dan perencana kotalah yang harus lebih banyak meninggalkan 'singgasana'-nya untuk turun ke daerah permukiman terpinggirkan, merasakan denyut nadi yang berdetak di masyarakat.

Kendala Pelaksanaan Program Penataan

Misi penataan arsitektur permukiman kumuh ke arah lebih manusiawi, yang mampu menjamin berbagai bentuk kontak sosial, saling hubungan yang intim dan personal, penciptaan kedamaian dan kesejahteraan sering menghadapi berbagai kendala.

Kendala kadang datangnya dari pihak penentu kebijaksanaan atau instansi berwenang karena dibabat habis oleh dorongan ego pejabat yang narkistis (menganggap diri paling benar), demi ambisi kekuasaan dan kepentingan pribadi.

KESIMPULAN

Hati dan perasaan dikalahkan oleh pikiran dan penalaran. Pertimbangan sosio-budaya ditindas oleh pemikiran ekonomis yang profit-motivated. Kurangnya kesadaran bahwa, yang diinginkan oleh masyarakat miskin di perkampungan kumuh kota adalah: hunian dengan ruangan luar ataupun dalam yang tidak sumpek, mendapat penerangan alami yang cukup, dan terkait dengan kegiatan usaha yang mereka lakukan. Alternatif pemecahannya dengan perbaikan mental dan peningkatan pemahaman terhadap kebutuhan dari masyarakat miskin kota ini. Sumber kendala lain, bisa juga datang dari warga masyarakat yang menjadi subjek pada sasaran program (pemilik rumah atau lahan dan calon penghuni/penyewa).

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko. 1983 & 1997. Arsitektur dan Kota di Indonesia. (1997 dengan tambahan materi). Bandung. Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1998. Sejumlah Masalah Permukiman Kota Bandung. Penerbit Alumni.
- Daldjoeni, N. 2003. Geografi Kota dan Desa. Bandung. Penerbit PT. ALUMNI.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta. Penerbit MR-United Press.
- Kuntowijoyo. 1987. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mangunwijaya, Y.B. 1995. Wastu Citra: Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur, Sendi-sendi Filsafatnya beserta Contoh Praktis. Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Dedi. 2003. "Permukiman Kumuh Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya" (Materi Seminar Arsitektur Fakultas Teknik). Denpasar, Jurusan Teknik Arsitektur FT UNUD. Tidak diterbitkan.
- Suwitri, Dewa Ayu Alit. "Karakteristik Permukiman Kumuh di Kota Denpasar" (Skripsi Tugas Akhir). Jurusan Teknik Arsitektur FT UNUD. Tidak diterbitkan.